#PKSPelayanRakyat

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

TERHADAP
RANCANGAN QANUN ACEH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA ACEH
TAHUN 2021

PANCACITA PKS

FRAKSI PKS DPR ACEH

Disampaikan Oleh:

Nova Zahara

MASA PERSIDANGAN TAHUN 2020
BANDA ACEH, 30 November 2020

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Terhadap

RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Washalatu Wassalamu'ala Asyrafil Anbiya'i Walmursalin. Sayyidina Wa Habibina Wa Syafi'ina Wa Maulana Muhammadin, Wa'alaa 'Alihi Washahbihi Ajma'in.

Yang kami hormati,

- Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- Wali Nanggroe atau yang Mewakili;
- Saudara Gubernur Aceh;

- Saudara unsur Forkompimda Aceh;
- Saudara Pimpinan Universitas Negeri dan Swasta,
- Saudara Sekretaris Daerah Aceh, Para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Para Kepala SKPA, Kepala Badan dan Pimpinan Lembaga Daerah;
- Yang kami Muliakan Para Alim Ulama, Tokoh Adat, Pimpinan OKP, LSM, dan rekan rekan Wartawan, baik media cetak maupun media elektronik
- Para Undangan serta Hadirin Hadirat Yang Kami Muliakan.

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir ini, kami Fraksi PKS mengajak kita semua untuk memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Ilahi Rabbi, Allah SWT, Sang Pemilik, Penguasa dan juga Penjaga Alam Semesta Raya ini. Dialah yang senantiasa melimpahkan anugerah, hidayah, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir ke gedung ini untuk menghadiri sidang Paripurna, dalam acara penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat, sekaligus tauladan yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, yang baldatun tayyibatun wa rabbur ghafur.

Hadirin Sidang Dewan Yang terhormat,

Pada forum yang mulia ini, perkenankanlah kami, Fraksi PKS menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Sidang, yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021.

Sidang Dewan Yang terhormat,

Pada kesempatan ini, izinkan kami Fraksi PKS memberikan beberapa pokok pikiran, saran dan masukan, melihat perkembangan aceh selama ini yaitu :

1. Meminta Gubernur Aceh Menjelaskan ke Masyarakat Aceh terhadap Silpa APBA 2020 sebesar Rp. 2.887.075.759.194,- (Dua Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Empat rupiah) berasal dari mana dan kenapa hal tsb terjadi

2. Penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) cenderung mengalamai penurunan dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang, hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Aceh, hanya mengantungkan sumber penerimaan dari transfer pemerintah pusat; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Perbantuan dan Dana Otonomi Khusua Aceh (DOKA), serta Dana Tambahan Bagi Hasi MiGAS Aceh (DTBH Minyak dan GAS) Aceh

3. Fraksi PKS DPR Aceh mengingatkan kembali bahwa DOKA dan TDBH Migas akan segera berakhir, oleh karenanya diperlukan pemikiran dan kerja ekstra dari kita semua para pemangku kepentingan untuk mencari sumber pembiyaan Aceh kedepan

4. Terhadap Multi Year Contrak (MYC) pada prinsipnya dapat disetujui ketika prosudedural, mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

5. Pada APBA tahun 2021 anggaran JKA yang dialokasikan Pemerintah Aceh mencapai 1,047 Triliun rupiah, untuk menanggung Premi 2.090. 600 penduduk aceh. Oleh karena itu Fraksi PKS meminta kepada Gubernur Aceh untuk memvalidkan data peserta BPJS agar Anggaran yang telah dialokasikan benar-benar untuk melayani kesehatan orang yang berhak. Selain Itu juga Kami, Mengusulkan Agar Pemerintah Aceh membentuk lembaga pengelola dana jaminan kesehatan masyarakat secara mandiri dalam bentuk Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Aceh (BPJKA) untuk mengelola dana APBA yang dikucurkan dalam program layanan kesehatan gratis. Dalam operasionalnya, badan tersebut nantinya akan tetap terintegrasi dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Republik Indonesia.

   Salah satu dampak positif dengan adanya lembaga baru tersebut, apabila misalnya BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran secara nasional, maka Aceh dipastikan tidak akan terdampak dengan defisit tersebut. Karena Aceh sudah memiliki lembaga pengelola dana JKA secara tersendiri meski dalam pelaksanaan operasionalnya terhubung dengan BPJS Kesehatan.

6. kami mengusulkan kepada pemerintah untuk meningkatkan status ruas jalan provinsi di aceh, seperti jalan panton labu menuju langkahan, dan jalan alue ie puteh menuju trans unit V, dengan adanya peningkatan status maka perhatian pemerintah terhadap prioritas pemerintah provinsi, begitu juga halnya di kabupaten-kabupaten yang lain.

7. kami berharap kepada pemerintah provinsi dan dinas terkait agar lebih serius dalam mengawasi pembangunan jalan, hal ini sangat penting dikarenakan kualitas jalan yang dibangun merupakan target utama, setelah itu kedepannya kita berharap anggaran yang dikeluarkan untuk rehab jalan provinsi angkanya semakin minim sehingga anggaran lebih hemat dan efisien.

8. Dalam sektor pertanian kami berharap kepada pemerintah dan dinas terkait agar benar-benar memperhatikan masalah irigasi, dengan harapan kedepannya para petani lebih mudah dalam mendapatkan air untuk lahan pertanian yang digarapnya

9. Kami meminta Pemerintah Aceh Untuk meningkatkan perhatiannya terhadap kesejahteraan guru-guru bakti dan honorer yang sampai saat ini telah banyak berjuang untuk memajukan pendidikan Aceh.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi kami Fraksi PKS, dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim** seraya memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wata'ala, dengan ini menyatakan Menerima Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021 dengan komposisi sebagai berikut:

a. Pendapatan Aceh	Rp 14.183.394.212.942,-
b. Belanja Aceh	Rp 16.990.469.972.136,-
Defisit/Surplus	Rp (2.807.075.759.194,-

c. Pembiayaan Aceh

1.	Penerimaan	Rp 2.887.075.759.194,-
2.	Pengeluaran	Rp 80.000.000.000,-
	Pembiayaan Netto	Rp 2.807.075.759.194,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,-

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Demikian pendapat akhir Fraksi PKS terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021. Kami berterima kasih kepada semua pihak atas segenap perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banda Aceh, 30 November 2020

FRAKSI PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Ketua	**Sekretaris**
H. Zaenal Abidin, S.Si	**Bardan Sahidi**

1.	Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag	Wakil Ketua
2.	dr. Purnama Setia Budi, Sp. OG	Bendahara
3.	Armiyadi, Sp	Anggota
4.	Nova Zahara	Anggota